

Cite this: *J.SST*, Vol 3 (2):
268-273, 2024

Received Date:
14 Maret 2024
Accepted Date:
29 Maret 2024

Keywords:
*Local government, Kelurahan,
Community Empowerment.*

Kata kunci:
Pemerintah daerah, Kelurahan,
Pemberdayaan Masyarakat

DOI:
<http://dx.doi.org/10.31960/tea.v5i1>
(contoh)

Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

The Role of the Village Government in Empowering Coastal Communities in Jenebora Village, Penajam District, Penajam Paser Utara Regency

Elly Herlina*; Wahyu²; Abdul Samad A³;
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar,
90231, Indonesia

*Email: ellyherlinaoke@gmail.com; wahyu.life@gmail.com; abdulsamad@unifa.ac.id
(Email institusi: pascasarjana@unifa.ac.id)

Abstract. *The kelurahan government must play a very important role in carrying out or accelerating the implementation of community empowerment. Empowerment requires a little technology because community empowerment is essentially a social change that uses natural resources to improve welfare in accordance with the prevailing socio-cultural and socio-economic climate. This type of research is qualitative research using a descriptive approach. The research location in this study was conducted in Jenebora Village, Penajam District, North Penajam Paser Regency. The results of this research show that the role of the Subdistrict Government in Empowering Coastal Communities in Jenebora Subdistrict has a role as a facilitator, motivator in managing community aspirations through consultations with village residents in poverty alleviation programs, and the factors that influence the Role of Subdistrict Government in Empowering Coastal Communities in Jenebora Subdistrict are The inhibiting factors include low education, productivity which is highly dependent on the season, limited business capital, lack of supporting facilities, poor market mechanisms and difficulty in transferring technology and communication availability of human resources, budget, commitment and leadership.*

Keywords: *Local government, Kelurahan, Community Empowerment.*

Abstrak. Pemerintah kelurahan harus berperan sangat penting dalam melaksanakan atau mempercepat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan memerlukan sedikit teknologi karena pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan perubahan sosial yang menggunakan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan iklim sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Jeneboramemiliki peran sebagai fasilitator, motivator dalam mengelola aspirasi masyarakat melalui rembug warga Kelurahan dalam program penanggulangan kemiskinan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Jenebora yaitu pada faktor penghambat memiliki pendidikan rendah, produktivitas yang sangat tergantung pada musim, terbatasnya modal usaha, kurangnya sarana penunjang, buruknya mekanisme pasar dan sulitnya transfer teknologi dan komunikasi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, komitmen dan kepemimpinan.

Kata kunci: Pemerintah daerah, Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN (After 3 pt)

Pada saat sekarang ini pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Karena pemerintah merupakan alat negara untuk mencapai tujuan negara itu sendiri. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan baik, dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan negara. Seperti halnya Bab IV UUD 1945 yang berbunyi:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Menurut UU Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014, kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan kebutuhan dan peluang daerah. Selain itu, investasi pemerintah kota dalam penguatan komunitas lokal juga memberi mereka tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, kebersamaan, pemerataan dan keadilan serta mempertimbangkan potensi dan keragaman daerah.

Dalam upaya memberdayakan individu dan masyarakat, sangat penting untuk memaksimalkan potensi diri dan lingkungan. Karena pekerjaan ini diperlukan agar orang dapat mengidentifikasi, menganalisis dan menentukan kebutuhan mereka dan untuk dapat menangani masalah yang mereka hadapi, secara mandiri memilih solusi alternatif. Bentuk nyata yang muncul adalah terbentuknya pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemberdayaan tersebut, istilah “pemberdayaan” semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama kehidupan masyarakat yang tinggal di kelurahan atau perkotaan. Menurut Mubarak (2010) Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertindak menurut nilai-nilainya sendiri guna memenuhi hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, ada lima prinsip utama: pendekatan top-down, partisipasi, konsep berkelanjutan, integrasi, utilitas dan sosial ekonomi (Prayitno, 2013).

Pemberdayaan diri adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat luas melalui kemampuan mengambil keputusan, mengelola lingkungan, dan memenuhi keinginan seseorang, termasuk akses terhadap sumber daya. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan kapasitas dan sikap masyarakat menuju kemandirian. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat merupakan pelaku dan penentu pembangunan.

Untuk mendukung UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menyatakan bahwa Lurah bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, salah satu tugas terpenting kelurahan atau kantor pengaduan adalah mampu menjalankan tugasnya untuk memperkuat masyarakat. Namun secara umum, kenyataannya, ketika evaluasi kinerja penguatan manajemen masyarakat terkesan formalitas belaka dan tidak melibatkan masyarakat, justru menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, sehingga masyarakat menganggap remeh pembangunan kelurahan dan sumber dayanya tidak dieksploitasi.

Pemerintah kelurahan harus berperan sangat penting dalam melaksanakan atau mempercepat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di bawah kepemimpinan pengurus berjalan dengan baik, meskipun peran dan keterlibatan pengurus dan masyarakat sudah baik. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting untuk kelancaran penguatan masyarakat kelurahan.

Fenomena yang menarik untuk dikaji sebagai bagian dari penelitian yang dilakukan adalah Kelurahan Jenebora, sebuah kelurahan di Kabupaten Penajam Kabupaten Pejaman Paser Utara. Menurut BPS (2023), Kabupaten Pejaman Paser Utara secara geografis memiliki luas daratan 3.060,82 km² dan luas lautan 3.333,06 km², dan sebagian besar penduduk di wilayah

pesisir bermatapencaharian sebagai nelayan. Hal ini karena sebagian besar wilayahnya adalah laut.

Pemerintah Kelurahan Jenebora, yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah melaksanakan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagaimana tertera dalam Tabel 3.2, program-program tersebut menghadapi sejumlah permasalahan dan kendala yang memerlukan perhatian serius.

Pertama-tama, program pelatihan budidaya Rumput Laut mengalami hambatan utama dalam bentuk kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran yang terbatas, dan minimnya sarana dan prasarana yang menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program ini. Hal serupa juga dialami oleh program pelatihan pembuatan terasi Udang dan pembuatan Kerupuk Udang, di mana kurangnya dukungan masyarakat, keterbatasan SDM, krisis anggaran, dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi tantangan utama.

Selanjutnya, program pemberian bantuan peralatan vacuum kemasan menghadapi kendala yang serupa, yaitu minimnya partisipasi masyarakat, kekurangan SDM, keterbatasan anggaran, dan sarana-prasarana yang tidak memadai. Program ini menunjukkan bahwa aspek partisipasi masyarakat menjadi perhatian khusus yang perlu ditingkatkan dalam implementasinya. Pemberian bantuan alat tangkap ikan dan bantuan mesin kapal nelayan, dua program lainnya, lebih terfokus pada krisis anggaran dan minimnya sarana serta prasarana. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dan infrastruktur, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan keberhasilan program-program tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi pelaksanaan program pemerintah di Kelurahan Jenebora. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM, alokasi anggaran yang lebih efisien, serta peningkatan sarana dan prasarana agar program-program tersebut dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat

Secara teori, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup dalam kaitannya dengan sumber daya pesisir dan laut serta melakukan kegiatan sosial ekonomi. Masyarakat pesisir adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lain yang menggantungkan penghidupan sosial ekonominya pada sumber daya alam laut (Sabarisman, 2017). Menurut (As, 2017), dalam penguatan masyarakat nelayan diperlukan pemenuhan kebutuhan yang menkelurahank, bukan upaya penyelesaian masalah, tetapi hanya bantuan sementara. Pemberdayaan memerlukan sedikit teknologi karena pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan perubahan sosial yang menggunakan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan iklim sosial budaya dan sosial ekonomi yang berlaku.

Maka dari itu, peneliti tertarik ingin mengkaji lpenelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.

METODOLOGI (After 3 pt)

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek, seperti perilaku, pengamatan, motif, tindakan, dan lain-lain, menggunakan kata-kata dan menggambarkan bahasa dalam konteks alami tertentu dan menggunakan metode naturalistik yang berbeda (Moleong, 2018). Teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh informasi (Hardani, et al., 2020). Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini terdiri dari beberapa teknik, yaitu Observasi, wawancara dan Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN (After 3 pt)

Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemerintah kelurahan memegang peran penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di

Kelurahan Jenebora. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan wilayahnya. Berikut adalah pembahasan mengenai peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir: Pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Kesuksesan program pemberdayaan sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan memiliki peran dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Mayoritas penduduk di Kelurahan Jenebora berprofesi sebagai nelayan. Dalam pembangunan ekonomi wilayah pesisir, peningkatan pendapatan masyarakat nelayan menjadi prioritas. Pengetahuan tentang pola penangkapan ikan, seperti penangkapan lepas pantai atau dekat pantai, juga penting dalam merancang program pemberdayaan.

Pemerintah kelurahan perlu mengembangkan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat pesisir. Ini dapat mencakup pelatihan, bantuan modal, peningkatan infrastruktur, dan bantuan alat tangkap untuk nelayan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam setiap program yang dilaksanakan.

Upaya pemberdayaan masyarakat harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah kelurahan dapat melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memperkuat kapasitas mereka.

Pembangunan yang berpusat pada masyarakat (People Centered Development) menekankan pentingnya mengembangkan kapasitas masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kekuatan internal. Hal ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya pesisir.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah kelurahan harus mengimplementasikan regulasi tersebut dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Jenebora sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

Pada uraian deskriptif ini, kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan mendasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling terkait dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pertama-tama, dari hasil wawancara dengan Lurah Jenebora, kita mengetahui bahwa terdapat faktor-faktor internal yang mempengaruhi peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Faktor-faktor tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan anggaran, komitmen dan kepemimpinan, serta koordinasi dan kerjasama antar-instansi terkait di tingkat kelurahan. Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya pengelolaan internal dalam menjalankan program pemberdayaan.

Selanjutnya, dari hasil wawancara yang sama, kita juga menemukan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Faktor-faktor tersebut meliputi dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, dan kondisi lingkungan. Faktor-faktor ini menunjukkan

bahwa kesuksesan program pemberdayaan tidak hanya bergantung pada upaya internal pemerintah kelurahan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang ada di lingkungan sekitarnya.

Salah satu faktor eksternal yang sangat penting adalah partisipasi masyarakat. Dari wawancara dengan staf kelurahan, kita dapat melihat bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat efektivitas program pemberdayaan dengan memberikan dukungan aktif, masukan, dan kerja sama dalam pelaksanaan program-program tersebut. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

Namun demikian, dalam konteks alokasi anggaran, kita dapat melihat bahwa faktor internal seperti ketersediaan anggaran juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas program pemberdayaan. Menurut wawancara dengan Lurah Jenebora, alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung implementasi program pemberdayaan, termasuk dalam hal pelatihan, bantuan peralatan, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan finansial yang memadai, pelaksanaan program pemberdayaan tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Selain itu, kerjasama antar-stakeholder juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Dari wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, kita dapat melihat bahwa peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kerjasama antar-stakeholder mencakup memfasilitasi komunikasi dan koordinasi, membangun forum dan platform kerjasama, serta mendorong kolaborasi dan sinergi antar-stakeholder dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Ini menunjukkan bahwa kerjasama antar-stakeholder menjadi kunci dalam mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih luas.

Kesaksian dari warga sekitar juga menyoroti pentingnya membangun kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri dalam melanjutkan program pemberdayaan. Dengan menyusun rencana aksi yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya yang memadai, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, masyarakat pesisir dapat terlibat secara aktif dalam pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraannya sendiri.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal saling terkait dan berkontribusi terhadap efektivitas peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Jenebora. Tanpa dukungan finansial yang memadai, partisipasi aktif masyarakat, kerjasama antar-stakeholder yang baik, serta kelembagaan masyarakat yang kuat, program pemberdayaan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Teori Pemberdayaan Masyarakat: Teori ini menjelaskan tentang proses dimana masyarakat dibantu untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka dalam mengatasi berbagai permasalahan dan mencapai kesejahteraan. Faktor-faktor internal dan eksternal yang diidentifikasi dalam uraian deskriptif sejalan dengan teori ini, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan upaya internal dari pemerintah kelurahan dan dukungan eksternal dari berbagai pihak. Penelitian di atas juga diperkuat penelitian terdahulu oleh Suharto (2016): Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor internal seperti komitmen dan kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat dan kerjasama antar-stakeholder, merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

SIMPULAN (After 3 pt)

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Jeneboramemiliki peran sebagai fasilitator, motivator dalam mengelola aspirasi masyarakat melalui rembug warga desa dalam program penanggulangan kemiskinan, program tersebut diantaranya memberikan pelatihan pembuatan terasi udang, pelatihan pembuatan kerupuk udang, pelatihan pengemasan produk kepada pelaku UMKM. Dalam program pemberdayaan tersebut Untuk mewujudkan masyarakat kesejahteraan, dan kemandirian. Diharapkan juga bisa berdampak positif terhadap pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Jenebora, kita melihat bahwa baik

faktor internal maupun eksternal memiliki peran yang penting. Faktor internal seperti ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, komitmen dan kepemimpinan, serta koordinasi antar-instansi turut menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Sementara itu, faktor eksternal seperti dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi lingkungan juga berperan krusial. Partisipasi aktif masyarakat, alokasi anggaran yang memadai, dan kerjasama antar-stakeholder menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kelurahan Jenebora. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan terintegrasi diperlukan dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan.

REFERENSI (After 3 pt)

- 1 Al Rasyid, S. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wisata Pantai Sulamadaha di Kelurahan Sulamadaha Kota Ternate (Doctoral dissertation, IPDN).
- 2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. 2023. Kabupaten Penajam Dalam Angka 2023.
- 3 Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta: Cv. Pusataka Ilmu
- 4 Moleong, Lexy J. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- 5 Mubarak, Z. 2010. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Kelurahan Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. Universitas Diponegoro
- 6 Prayitno, U. S., & Dan Informasi, P. P. P. D. 2013. Pemberdayaan Masyarakat. P3di Setjen Dpr, Republik Indonesia Dan Azza Grafika
- 7 Sabarisman, M. 2017. Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 3(3).
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.